

Evaluasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation*: Studi Kasus Di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara Tahun 2026

Arif Taufiek¹, Iqbal Aidar Idrus^{2*}, Dandi Darmadi²

¹Magister Administrasi Publik, Universitas Andi Djemma

²Dosen Administrasi Publik, Universitas Andi Djemma

Email: iqbal_aidar@unanda.ac.id

INFO ARTIKEL

Research Article

Kata Kunci:

Evaluasi; Kabupaten Luwu Utara;
SIKS-NG

Keyword:

*Evaluation; Luwu Utara
Regency; SIKS-NG*

Article History

Dikirim : 30 Juli 2026

Diterima: 26 Agustus 2026

Dipublikasi: 30 Agustus 2026

ABSTRAK

Tulisan akan mengkaji perihal evaluasi penerapan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIKS-NG. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan basis data terpadu yang akurat, tepat sasaran, dan dapat diakses secara real-time oleh seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat hingga daerah. Sebagai sebuah hasil inovasi, SIKS-NG tidak luput dari masalah. Seperti pelaksanaan SIKS-NG di Kabupaten Luwu Utara, beberapa masalah muncul dalam pelaksanaannya, seperti kualitas operator ditingkat desa rendah, jaringan mudah eror, sampai pelatihan untuk operator yang sangar jarang dilaksanakan. Tulisan ini menggunakan kerangka kerja evaluasi program model Context, Input, Process, Product atau CIPP yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian evaluasi, dengan mengadopsi desain studi kasus tunggal, data primer yang digunakan melalui observasi dan wawancara secara langsung, dengan analisis data menggunakan pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa dalam evaluasi konteks sudah dilakukan dengan baik, evaluasi input kualitas operator ditingkat desa masih harus mendapatkan perhatian lebih. Pada bagian evaluasi proses hal yang perlu ditingkatkan adalah pelatihan yang memadai untuk operator, sedangkan evaluasi produk mendapatkan hasil yang baik dalam tulisan ini.

Abstract

This paper will examine the evaluation of the implementation of the Next Generation Social Welfare Information System (SIKS-NG). This system aims to create an integrated database that is accurate, targeted, and accessible in real time by all stakeholders from the central to the local levels. As an innovation, SIKS-NG is not without its challenges. As seen in the implementation of SIKS-NG in North Luwu Regency, several issues have arisen, such as low operator competence at the village level, frequent network errors, and training sessions for operators that are rarely conducted. This paper employs the Context, Input, Process, Product (CIPP) program evaluation framework developed by Daniel Stufflebeam. The methodology employed is a qualitative approach using an evaluation research design, adopting a single-case study design. Primary data were collected through direct observation and interviews, with data analysis involving data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing/verification. The results of this study indicate that the context evaluation was conducted well, while the evaluation of operator quality at the village level still requires more attention. Regarding the process evaluation, adequate training for operators needs to be improved, whereas the product evaluation yielded positive results in this study.

Pendahuluan

Tulisan ini akan mengkaji tentang evaluasi penerapan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* atau SIKS-NG di Kabupaten Luwu Utara tahun 2026. Saat ini transformasi digital semakin berkembang setiap harinya, perkembangan teknologi informasi yang ada telah memberikan solusi dalam pelayanan publik (Malipi et al., 2023). Berbagai sektor saat ini berlomba menerapkan transformasi digital, tidak terkecuali sektor pemerintahan. Seperti yang dikatakan Janssen & van der Voort (2020) bahwa transformasi digital dalam pemerintahan bukan hanya tentang adopsi teknologi, tetapi secara fundamental tentang membayangkan kembali bagaimana pelayanan publik diberikan untuk menciptakan nilai bagi warga negara. Pemanfaatan transformasi digital diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, tidak terkecuali dalam pengelolaan data kemiskinan. Hal ini menjadi penting untuk perencanaan kebijakan, sasaran program, dan pengambilan keputusan yang terkait program pengentasan kemiskinan hingga tingkat lokal (Salsabila et al., 2025).

Sebagai sebuah kebijakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* memiliki aturan yang mengikat untuk dijalankan. Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjadi dasar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia, lebih jauh undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin juga mewajibkan pemutakhiran data dilakukan oleh Kabupaten atau Kota (Yulfa & Suhita, 2025). Kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan yang mengamanatkan penggunaan sistem informasi terpadu untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan.

Secara khusus Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial mengatur tentang penyelenggaraan, pengelolaan, dan pemanfaatan SIKS-NG. Luwu Utara sebagai sebuah Kabupaten juga menambah aturan dalam penerapan SIKS-NG dengan adanya Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* adalah *tools* yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pengusulan data dan perbaikan data terpadu bagi masyarakat yang kurang mampu (Haromin & Andriyansah, 2022). Untuk mendukung penerapan SIKS-NG Pemerintah Daerah Luwu Utara tidak hanya membuat aturan semata, tetapi didukung dengan anggaran yang disediakan. Berdasarkan data APBD Kabupaten Luwu Utara tahun 2023, alokasi anggaran untuk digitalisasi pelayanan sosial mencapai Rp 450 juta, yang mencakup pengembangan sistem informasi, peningkatan kapasitas SDM, dan penyediaan infrastruktur IT.

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* hadir tidak hanya sebagai program biasa. Sebagaimana kita ketahui, kesejahteraan sosial akan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara (2024) tingkat kemiskinan di daerah ini mencapai 11,24% atau sekitar 36.460 jiwa dari total populasi 335.161 jiwa. Dimana data tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan akan program bantuan sosial yang efektif dan tepat sasaran.

Data dari Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara menunjukkan bahwa jumlah penerima bantuan sosial mengalami peningkatan signifikan, terutama selama masa dan pasca pandemi COVID-19. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 20.000 penerima manfaat (Novita, 2022), ada juga Bantuan Sosial Pangan dengan 24.318 keluarga penerima manfaat (BPS Sulawesi Selatan, 2022), dan bantuan sosial lainnya. Dimana untuk efektivitas data memerlukan suatu sistem pengelolaan data yang terintegrasi dan akurat. Sebelum penerapan SIKS-NG proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan masih dilakukan secara manual dan terpisah-pisah, sehingga rentan terhadap duplikasi data, kesalahan targeting, dan inefisiensi administrasi. Untuk itulah SIKS-NG diterapkan di Kabupaten Luwu Utara sebagai cara guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya agar lebih akurat secara data.

SIKS-NG jika mengacu pada Peraturan Menteri Sosial nomor 3 tahun 2021 merupakan sistem yang dibuat untuk mendapatkan data terpadu kesejahteraan sosial, data yang ada dijadikan acuan dalam program penanganan dan penyelenggaraan sosial. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan basis data terpadu yang akurat, tepat sasaran, dan dapat diakses secara *real-time* oleh seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat hingga daerah.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis, penerapan SIKS-NG di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara menunjukkan progress yang bervariasi. Sistem ini telah berhasil mengintegrasikan data penerima bantuan dari berbagai program dengan tingkat integrasi data mencapai 78%, namun di sisi lain masih terdapat kendala dalam hal pemanfaatan fitur-fitur *advanced system* dan optimalisasi data *analytics* untuk pengambilan keputusan.

Permasalahan lain yang ditemukan seperti keterlambatan input data dan update informasi juga masih terjadi, dengan rata-rata *delay update* data mencapai 15-20 hari dari target yang ditetapkan. Hal ini dapat berdampak pada akurasi targeting program bantuan sosial dan efektivitas monitoring program. Selain itu, tingkat utilisasi sistem masih mencapai 65% dari kapasitas optimal, yang menunjukkan masih ada ruang untuk peningkatan pemanfaatan sistem.

Selain itu kapasitas petugas dalam mengoperasikan sistem secara optimal masih memerlukan peningkatan. Berdasarkan *assessment* awal, hanya 60% petugas yang memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan seluruh fitur Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation*, sementara 40% lainnya masih memerlukan pelatihan dan pendampingan intensif. Untuk memudahkan pembaca dalam melihat permasalahan yang terjadi, tabel 1 menyajikan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan SIKS-NG berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis.

Tabel 1 : Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation dengan Pendekatan Konteks, Input, Proses, dan Produk

Dimensi	Permasalahan
Konteks	Secara umum bagian ini sudah dijalankan dengan cukup baik, terdapat regulasi yang jelas, dukungan dari manajemen puncak dan bermanfaatnya SIKS-NG sebagai basis data
Input	Bagian ini memperlihatkan bahwa hanya sekitar 30% operator ditingkat desa yang menguasai fitur-fitur yang ada dalam SIKS-NG
Proses	Permasalahan yang muncul dalam dimensi proses berhubungan langsung dengan dimensi input, karena dalam bagian ini permasalahan yang muncul antara lain kurangnya pelatihan yang disediakan oleh dinas ditingkat Kabupaten
Produk	Secara umum pada bagian ini memperlihatkan manfaat nyata dari hadirnya SIK-NG, data yang ada dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran

Sumber : Data diolah penulis. 2026

SIKS-NG hadir dalam diskusi akademik melalui beberapa pendekatan, Gobel et al., (2022) melakukan evaluasi kepuasan pengguna SIKS-NG di Kabupaten Bone Bolano dengan teori EUCS. kajian ini fokus pada lima aspek yang memuat kepuasan pengguna yaitu isi, keakuratan, format, kemudahan dalam penggunaan dan ketepatan waktu. Sementara itu Purwati (2023) melakukan kajian SIKS-NG dengan kacamata E-Government di Kabuapten Toba. Sedangkan Zidan & Syamsir (2026) mengkaji efektivitas dari penerapan SIKS-NG di Kota Padang.

Dari permasalahan yang ada dalam penerapan SIKS-NG di Kabupaten Luwu Utara masih menyisakan ruang untuk perbaikan, dalam penelitian terdahulu juga tidak melakukan evaluasi secara komprehensif sehingga pemanfaatan dari program ini bisa dirasakan oleh masyarakat secara maksimal. Mengingat pentingnya peran SIKS-NG dalam mendukung efektivitas program kesejahteraan sosial dan belum adanya evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan SIKS-NG di Kabupaten Luwu Utara, maka penelitian ini menjadi relevan dan *urgen* untuk dilakukan. Evaluasi yang mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi *best practices* dan *lessons learned* yang dapat dijadikan dasar untuk perbaikan pelaksanaan SIKS-NG di masa mendatang.

Sehingga tulisan ini mempunyai pertanyaan penelitian “Bagaimana Evaluasi SIKS-NG di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara dilihat dari aspek *konteks, input, proses, dan produk*?”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi SIKS-NG di Kabupaten Luwu Utara dilihat dari aspek konteks, input, proses, dan produk. Berbagai temuan lapangan nantinya akan dibahas secara detail dan mendalam dalam bab berikutnya sehingga evaluasi terhadap program SIKS-NG di Kabupaten Luwu Utara dapat dilakukan secara komprehensif.

Tinjauan Pustaka

SIKS-NG sebagai program dari pemerintah pusat telah dikaji oleh beberapa penulis lainnya. Beberapa penelitian terdahulu pernah melakukan kajian tentang program ini, dari beberapa penelitian yang dilakukan umumnya menggunakan perspektif *e-government* seperti yang dilakukan oleh Ramadan et al (2024) yang mengkaji SIKS-NG di Kelurahan Cisaranten Wetan dengan penerapan e-

government untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Sedangkan (Andriani et al., 2023), mengkaji program SIKS-NG dengan penerapannya menggunakan kerangka kerja *e-government* di Bengkulu Selatan.

Selain menggunakan kerangka kerja *e-government*, beberapa kajian juga ditemukan menggunakan analisis berbeda. Seperti yang dikaji oleh Ramadhani & Agustina (2025) yang melihat program SIKS-NG dengan kerangka kerja efektivitas Richard M Steers, kajian yang dilakukan di Desa Permisian Kabupaten Sidoarjo ini memperlihatkan hasil yang efektif sehingga penyaluran bantuan lebih tertata. Sementara itu (Pohan & Salisah, 2021) mengkaji program SIKS-NG dengan pendekatan McCall dengan pengukuran matrik operabilitas dan matrik pelatihan di Kabupaten Langkat.

Beberapa kajian yang membahas SIKS-NG juga ditemukan menggunakan kerangka kerja evaluasi, seperti yang dilakukan oleh (Padang et al., 2026) yang mengkaji program SIKS-NG sebagai Basis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional di Kabupaten Yalimo dengan menggunakan kerangka kerja evaluasi dari Wiliam Dunn. Sedangkan (Setiawan & Yamasari, 2025) mengkaji evaluasi website SIKS-NG di Kabuapten Magetan dengan menggunakan Google Lighthouse.

Dari berbagai kajian terdahulu yang sudah disampaikan, serta berbagai masalah yang ada dalam penerapan SIKS-NG di Kabupaten Luwu Utara, maka perlu adanya kajian keberlanjutan sebagai langkah akademik dengan mengevaluasi secara komprehensif penerapan SIKS-NG. Evaluasi yang dimaksud harus dilakukan secara komprehensif mengingat pentingnya peran SIKS-NG dalam mendukung efektivitas program kesejahteraan sosial.

Untuk itu tulisan ini akan menggunakan kerangka kerja model evaluasi yang dikembangkan oleh Stufflebeam (2000) yaitu *Context, Input, Process, Product* (CIPP). menyatakan bahwa model CIPP menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk mengevaluasi sebuah program. Model ini dirancang untuk membantu evaluator dan pengambil keputusan dalam memahami kekuatan dan kelemahan program serta memberikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Evaluasi model CIPP dilakukan untuk memahami aktivitas program tertentu, dari munculnya ide hingga hasil yang diperoleh dari program yang dibuat (Rahmayanti et al., 2024).

Sementara menurut Stufflebeam model CIPP berfokus pada peningkatan program daripada

sekadar membuktikan nilai program. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan informasi evaluasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan peningkatan program secara berkelanjutan. Model CIPP telah banyak digunakan dalam berbagai konteks evaluasi, termasuk evaluasi sistem informasi di sektor publik karena kemampuannya memberikan gambaran holistik tentang implementasi program. Untuk melakukan evaluasi dengan pendekatan CIPP, evaluator harus mengevaluasi dan menganalisis dari komponen-komponen program (Faizin, 2021). Adapun menurut Stufflebeam dan Zhang komponen dalam model evaluasi CIPP sebagai berikut :

1. *Context Evaluation* atau Evaluasi Konteks

Evaluasi konteks bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai kebutuhan, masalah, aset, dan peluang dalam lingkungan tertentu. evaluasi ini membantu pengguna evaluasi untuk mendefinisikan dan menilai tujuan, serta kemudian merujuk pada kebutuhan yang telah dinilai dari penerima manfaat yang ditargetkan. Seperti kata Stufflebeam evaluasi salah satu kriteria untuk menetapkan tujuan dalam evaluasi konteks ialah menyediakan landasan untuk menetapkan tujuan yang berorientasi pada perbaikan

2. *Input Evaluation* atau Evaluasi Input

Evaluasi input menilai pengaturan penilaian tenaga kerja, anggaran dalam kelayakan untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi target dari program. Para perencana program dapat memanfaatkan temuan evaluasi masukan secara bermanfaat untuk membantu merencanakan program mereka, menyusun proposal pendanaan yang berhasil, mengalokasikan sumber daya, menugaskan staf, menjadwalkan pekerjaan, dan pada akhirnya membantu pihak lain menilai

3. *Process Evaluation* atau Evaluasi Proses

Evaluasi proses memantau, mendokumentasikan, menilai, dan melaporkan pelaksanaan rencana. Evaluasi semacam itu kata Stufflebeam memberikan umpan balik sepanjang pelaksanaan program dan kemudian melaporkan sejauh mana program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dan dibutuhkan. Evaluasi proses membantu staf menjaga agar kegiatan berjalan secara efisien dan efektif, mengevaluasi kemajuan mereka, mengidentifikasi masalah pelaksanaan, menyesuaikan rencana dan kinerja mereka untuk memastikan kualitas program dan penyampaian

layanan tepat waktu, serta mendokumentasikan proses tersebut

4. *Product Evaluation* atau Evaluasi Produk

Evaluasi produk menilai hasil dan dampak program untuk menentukan apakah tujuan telah tercapai dan mengidentifikasi efek samping yang mungkin timbul. Evaluasi ini memberikan umpan balik selama pelaksanaan program mengenai sejauh mana tujuan program sedang ditangani dan dicapai. Tujuan utamanya adalah memastikan sejauh mana objek evaluasi memenuhi kebutuhan semua penerima manfaat yang berhak (Stufflebeam & Zhang, 2017).

Evaluasi model CIPP berpandangan bahwa tujuan terpenting dari evaluasi bukanlah membuktikan suatu program salah atau benar, akan tetapi meningkatkan nilai dari program yang ada (Mahmudi, 2011). Dalam tulisan ini keempat komponen CIPP digunakan untuk mengevaluasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara secara berlapis dan komprehensif.

Dengan menggunakan evaluasi model CIPP akan memberikan *framework* yang terstruktur untuk melakukan evaluasi secara komprehensif yang mencakup semua aspek pelaksanaan SIKS-NG di Kabupaten Luwu Utara. Model CIPP terdiri dari empat komponen yang membentuk satu kesatuan evaluasi yang saling terkait. Evaluasi konteks nantinya akan melihat kondisi, regulasi, dan kelembagaan yang melatarbelakanginya SIKS-NG di Luwu Utara, evaluasi input akan melihat kecakapan dari sumber daya yang ada, baik dari sisi SDM ataupun anggarannya. Sementara itu evaluasi proses akan menilai terkait pelaksanaan SIKS-NG, dan evaluasi produk akan melihat hasil dari pelaksanaan SIKS-NG.

Metode

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 2015). Sedangkan jenis penelitian kualitatif dalam tulisan ini memakai pendekatan studi kasus, menurut Creswell (2013) studi kasus adalah pendekatan kualitatif di mana peneliti mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem kontemporer yang terbatas (sebuah kasus) atau

beberapa sistem (kasus) yang terbatas dari waktu ke waktu. Tulisan ini secara spesifik mengadopsi desain studi kasus tunggal (*single case study*) dengan unit analisis dalam evaluasi program SIKS-NG di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara. Dengan menggunakan studi kasus tunggal penelitian ini akan menampilkan data secara terperinci terkait pelaksanaan SIKS-NG, pembahasan tidak melebar dan akan fokus hanya pada satu titik, hal ini akan memungkinkan hasil penelitian yang tidak bias, selain itu hasil penelitian juga nantinya dapat dipakai oleh pengambil keputusan di wilayah Luwu Utara.

Sumber data dalam tulisan ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Untuk sumber primer diperoleh langsung dari sumber asalnya melalui observasi dan wawancara. Observasi partisipan seperti kata (Nasution, 2023) adalah dimana ketika peneliti sebagai partisipan, dalam makna sebagai pengamat yang belajar melalui pengalaman langsung, berusaha masuk kedalam kehidupan orang lain yang akan diteliti, dalam arti mencari tahu sumber permasalahan yang terjadi. Sementara itu wawancara mendalam memiliki karakter yang khas, yaitu menggunakan pertanyaan yang terbuka, mewawancarai satu orang dalam satu waktu, terdapat pertanyaan pertama, pertanyaan tambahan dan pertanyaan investigatif. Itu dilakukan untuk menggali secara mendalam sehingga mendapatkan data yang diinginkan (Sulistiyawati, 2023). *Informan* dalam tulisan ini terdiri dari 8 orang, yaitu *top management* dengan kepala dinas 1 orang, *middle management* 2 orang terdiri dari sekretaris dinas dan kepala bidang bantuan dan jaminan sosial, serta dari operation level sebanyak 5 orang.

Data sekunder didapat dari bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah penelusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet. Data sekunder biasanya digunakan sebagai data pendukung dari data primer, oleh karena itu harus selektif dan hati-hati dalam memilih dan menggunakannya (Sarwono, 2006).

Hasil dan Pembahasan

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* atau SIKS-NG di Kabupaten Luwu Utara dimulai pada tahun 2018 sebagai bagian dari program nasional digitalisasi pelayanan sosial. Berdasarkan hasil lapangan yang dilakukan oleh penulis selama bulan Maret sampai Mei tahun 2026 program SIKS-NG memainkan peran strategis dan multidimensional dalam transformasi pelayanan

kesejahteraan sosial di Kabupaten Luwu Utara. Pertama, sebagai *integrated database system*, SIKS-NG berfungsi sebagai repository terpadu yang mengkonsolidasikan data penerima bantuan sosial dari berbagai program seperti PKH, BPNT, bantuan pangan, dan program bantuan sosial lainnya, sehingga mengeliminasi duplikasi data dan meningkatkan konsistensi informasi. Kedua, sebagai *decision support system*. Program ini menyediakan *dashboard* analitik dan reporting tools yang memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data oleh management dan policy makers, memungkinkan analisis trend, pola, dan proyeksi program bantuan sosial secara real-time.

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* atau SIKS-NG memiliki keunggulan, dari hasil penelitian lapangan (Selasa, 7 April 2026) ditemukan beberapa keunggulannya. Pertama, akurasi dan integritas data yang lebih tinggi, dengan standar 26 variabel kemiskinan yang terukur dan terstandarisasi secara nasional. SIKS-NG meminimalisir ruang untuk manipulasi data berbasis kepentingan personal. SIKS-NG menciptakan audit trail digital yang memungkinkan setiap perubahan data dilacak hingga ke operator yang melakukan perubahan tersebut.

Kedua, efisiensi proses yang signifikan. Proses verifikasi dan validasi yang sebelumnya dilakukan secara *ad-hoc* kini dapat dilakukan setiap bulan melalui mekanisme yang terstandarisasi. Proses pelaporan kepada pimpinan dan Kementerian yang sebelumnya membutuhkan kompilasi manual sehari-hari kini dapat dilakukan dalam hitungan menit melalui *dashboard* yang tersedia.

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas yang meningkat. Data DTKS dalam SIKS-NG dapat diaudit oleh lembaga pemeriksa seperti BPK, BPKP, dan Inspektorat sehingga menciptakan sistem akuntabilitas yang jauh lebih kuat. Ketentuan penyaluran bantuan kepada yang tidak terdata dalam SIKS-NG akan menjadi temuan pemeriksaan menciptakan insentif yang sangat kuat bagi pengelola program untuk mematuhi standar sistem.

Keempat, interoperabilitas lintas sektoral. SIKS-NG dirancang untuk dapat diintegrasikan dengan sistem data instansi lain, terutama Dukcapil. data DTKS dalam SIKS-NG telah menjadi referensi lintas sektoral yang digunakan oleh berbagai SKPD di Kabupaten Luwu Utara dalam merencanakan dan melaksanakan program pengentasan kemiskinan. Menjadikannya infrastruktur data bersama yang nilainya melampaui fungsi Dinas Sosial semata.

Kelima, aksesibilitas dan kemudahan penggunaan. SIKS-NG dirancang dengan antarmuka yang relatif intuitif, disertai panduan pengguna (*user guide*) yang dapat diunduh, dan *helpdesk* Kemensos yang responsif. Kemampuan akses dari perangkat apa pun yang terhubung internet termasuk *smartphone* juga memberikan fleksibilitas operasional yang jauh lebih tinggi dibandingkan aplikasi *desktop offline*.

Data menunjukkan bahwa penerima bantuan kesejahteraan sosial di Kabupaten Luwu Utara mencapai 50 ribu jiwa. Tabel 1 menyajikan data penerima bantuan sosial yang dikelola melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* atau SIKS-NG di Kabupaten Luwu Utara. Data ini menggambarkan besarnya skala operasional yang ditangani sistem dan kompleksitas pengelolaan yang membutuhkan infrastruktur data yang handal

Tabel 2 : Penerima Bansos di Kabupaten Luwu Utara

No.	Program Bantuan Sosial	Jumlah KPM	Dasar Hukum
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	16.736 KK	Permensos No. 1/2018
2	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / Program Sembako	26.581 KK	Perpres No. 63/2017
3	Bantuan Sosial Tunai (BST) / Reguler	Disesuaikan APBN	Permensos No. 54/2021
4	Rehabilitasi Sosial (Lansia, Disabilitas)	Data DTKS	UU No. 11/2009
5	Program Pemberdayaan Sosial Lainnya	Berbasis DTKS	RPJMD Kab. Luwu Utara
Total	Seluruh warga dalam <i>database</i> SIKS-NG	± 50.000+ jiwa	Permensos No. 3/2021

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara tahun 2024, diolah tahun 2026

Dalam penelitian ini, keempat komponen CIPP digunakan untuk mengevaluasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* di Kabupaten Luwu Utara secara berlapis dan komprehensif. Menurut Stufflebeam (2000), salah satu fungsi evaluasi adalah menyediakan landasan yang memadai bagi penetapan tujuan dan pengambilan keputusan.

Evaluasi konteks

Evaluasi konteks memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa program atau sistem ini diperlukan dan apa kondisi lingkungan yang melingkupinya. Temuan evaluasi konteks di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara mencakup empat dimensi utama, yaitu landasan regulasi, dukungan manajemen puncak, kondisi organisasi, dan relevansi sistem dengan kebutuhan daerah.

a. Landasan Regulasi dan Kerangka Kebijakan

Penerapan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation di Kabupaten Luwu Utara memiliki kerangka regulasi yang kokoh, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pada tingkat nasional, regulasi utama yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Regulasi ini mengatur secara komprehensif tentang mekanisme verifikasi dan validasi DTKS, tata cara pengusulan dan penidaklayakan penerima bantuan sosial, serta pengelolaan data di berbagai tingkatan mulai dari pusat hingga desa. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara saudara Ari Setiawan

“Permensos No. 3 Tahun 2021 menjadi pegangan yang sangat penting bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengelola SIKS-NG. Beliau menjelaskan bahwa regulasi tersebut secara jelas memilah masyarakat berdasarkan desil kesejahteraan, sehingga pemerintah daerah memiliki panduan yang terukur dalam menentukan siapa yang layak dimasukkan sebagai penerima manfaat dan siapa yang tidak. Regulasi ini, menurut Kadis, menjadi dasar legitimasi bagi seluruh proses pendataan dan pengelolaan data kesejahteraan sosial di Kabupaten Luwu Utara” (8 April, 2026).

Hal ini menggambarkan kepatuhan penerapan terhadap regulasi nasional Ketika regulasi memberikan panduan yang jelas, para implementor di berbagai jenjang dapat melaksanakan tugasnya dengan kepastian hukum yang memadai. Senada dengan hal tersebut Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Maliana menambahkan bahwa

“Permensos No. 3 Tahun 2021 bukan hanya menjadi acuan di tingkat Dinas Sosial, tetapi juga telah disosialisasikan secara aktif hingga ke tingkat operator desa dan kelurahan. Sosialisasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan di berbagai jenjang memiliki pemahaman yang seragam tentang tujuan, dan standar operasional penggunaan SIKS-NG. Dengan demikian, implementasi sistem tidak hanya berlangsung di level dinas, tetapi juga

menyentuh ujung tombak pelayanan di tingkat desa dan kelurahan” (8 April, 2026).

Pernyataan Kepala Bidang ini mengkonfirmasi bahwa sosialisasi regulasi tidak berhenti di level dinas, melainkan menyentuh ujung tombak pelaksanaan di level desa dan kelurahan. Ketika regulasi yang ada memberikan panduan yang jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas interpretasi, para implementor di berbagai jenjang dapat melaksanakan tugasnya dengan keyakinan dan kepastian hukum yang memadai.

b. Dukungan Manajemen Puncak

Dukungan manajemen puncak merupakan salah satu faktor penting pelaksanaan SIKS-NG di Kabupaten Luwu Utara. Dalam penelitian ini dukungan manajemen puncak terlihat dari komitmen Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara yang secara eksplisit menempatkan program penurunan angka kemiskinan sebagai salah satu prioritas dalam visi misi kepemimpinan mereka. Kepala Dinas menjelaskan bahwa pimpinan daerah menetapkan program pengentasan kemiskinan sebagai agenda strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Salah satu instrumen utama dalam mewujudkan program tersebut adalah data DTKS yang dikelola melalui SIKS-NG.

Lebih dari itu, Bupati juga memerintahkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki program pengentasan kemiskinan untuk merujuk kepada data DTKS dalam SIKS-NG sebagai basis perencanaan program. Hal ini menciptakan ekosistem pemanfaatan data yang sifatnya lintas sektoral, di mana SIKS-NG tidak hanya digunakan oleh Dinas Sosial, tetapi juga menjadi referensi bagi dinas-dinas lain dalam merencanakan dan melaksanakan program yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Kepala Dinas menyebut contoh konkret berupa program bedah rumah oleh Dinas PU, PR, dan Tarkim yang menggunakan data DTKS untuk memastikan program tersebut tepat sasaran. Dukungan manajemen puncak ini diamini oleh operator dinas Resti Eka Fitriana yang menyebut.

”Dukungan manajemen puncak juga terlihat dalam bentuk kebijakan penekanan pentingnya digitalisasi data kesejahteraan sosial demi transparansi, akurasi, dan integrasi program bantuan. Dukungan ini tidak bersifat deklaratif semata, tetapi diwujudkan dalam bentuk kebijakan konkret, pengawasan langsung terhadap proses

verifikasi dan validasi data, serta upaya peningkatan kapasitas operator melalui program pelatihan” (Wawancara 8 April, 2026)

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation di Kabupaten Luwu Utara mendapat dukungan yang kuat dari manajemen puncak, baik di tingkat pemerintah kabupaten maupun di tingkat Dinas Sosial.

c. Relevansi Sistem Dengan Dukungan Daerah

Salah satu aspek penting dalam evaluasi konteks adalah sejauh mana sistem yang diimplementasikan relevan dan sesuai dengan kebutuhan nyata pengelolaan bantuan sosial di daerah. Temuan dalam tulisan ini menunjukkan bahwa secara umum fitur-fitur dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation dinilai sesuai dengan kebutuhan pengelolaan bantuan sosial di Kabupaten Luwu Utara.

Kepala Bidang Maliana menyatakan bahwa fitur-fitur yang tersedia dalam SIKS-NG secara umum sudah sesuai dengan kebutuhan nyata pengelolaan bantuan sosial di Luwu Utara, meskipun masih diperlukan beberapa penambahan untuk lebih memudahkan proses pengolahan data. Operator Dinas Resti Eka Fitriana juga menyatakan hal yang serupa, bahwa fitur-fitur yang tersedia sudah sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan.

Sebelumnya proses pendataan dilakukan secara manual menggunakan formulir kertas yang kemudian diinput ke dalam aplikasi offline Basis Data Terpadu. Proses ini tidak hanya memakan waktu dan sumber daya yang besar, tetapi juga rentan terhadap berbagai permasalahan seperti data tidak akurat, data tidak update, duplikasi data, dan potensi manipulasi oleh oknum tertentu. Kepala Dinas menggambarkan kondisi sebelum SIKS-NG sebagai situasi di mana data kemiskinan keakuratannya sangat dipertanyakan karena proses pendataan yang dilakukan secara manual dan sangat dipengaruhi oleh kepentingan personal oknum pemerintah setempat. Penerapan SIKS-NG membuat masalah tersebut dapat diatasi secara sistematis.

Evaluasi input

Dalam analisis evaluasi input menilai pengaturan penilaian tenaga kerja, anggaran dalam

kelayakan untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi target dari program, pada akhirnya menilai perencanaan yang akan dilakukan dalam menjalankan program. Dari hasil wawancara dan temuan dalam tulisan ini didapat penilaian kerja melalui kualitas sumber daya manusia, anggaran untuk program SIK-NG, hingga perencanaan yang ada.

a. Sumber daya manusia dan kompetensi operator

Sumber daya manusia merupakan komponen input yang paling krusial dalam penerapan sistem informasi berbasis teknologi. Kualitas dan kompetensi pengguna sistem akan sangat menentukan sejauh mana potensi sistem dapat dioptimalkan. Dalam tulisan ini mengidentifikasi adanya kesenjangan kompetensi yang signifikan di antara para operator SIKS-NG, khususnya di tingkat desa dan kelurahan seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Meliana

“Saat ini hanya sekitar 30% operator di tingkat desa yang benar-benar memahami dan menguasai seluruh fitur SIKS-NG. Rendahnya angka penguasaan fitur ini sebagian besar disebabkan oleh tingginya tingkat pergantian operator di tingkat desa. Ketika seorang operator yang telah terlatih digantikan oleh operator baru, pengetahuan dan keterampilan yang telah dibangun tidak selalu tertransfer dengan baik kepada penggantinya. Akibatnya, setiap kali terjadi pergantian operator, proses pembelajaran harus dimulai dari awal, yang berimplikasi pada penurunan kualitas pengelolaan data secara temporer” (8 April, 2026).

Data estimasi 30% yang disampaikan tentang penguasaan fitur-fitur merupakan indikator yang sangat kritis. rendahnya penguasaan fitur secara langsung menurunkan perceived ease of use yang pada gilirannya mengurangi intensitas dan kualitas penggunaan sistem oleh operator desa. Sementara itu di tingkat Dinas Sosial, tingkat penguasaan fitur dinilai jauh lebih tinggi. Operator Dinas Hermanto Syam menyebutkan bahwa pada saat itu sekitar 99% operator dinas telah memahami cara menggunakan sistem.

b. Anggaran dan pembiayaan Operasional

Berdasarkan hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa anggaran untuk implementasi SIKS-NG di Kabupaten Luwu Utara memang tersedia, namun dalam jumlah yang masih dinilai belum sepenuhnya mencukupi oleh para informan. Kepala Dinas menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran dari APBD Kabupaten Luwu Utara untuk mendukung operasionalisasi

SIKS-NG, yang meliputi biaya pengembangan kapasitas SDM melalui program pelatihan operator, serta biaya operasional pengelolaan sistem. Selain dari APBD, pemerintah daerah juga mengoptimalkan anggaran dana desa dan dana kelurahan sebagai sumber pembiayaan honorarium operator di tingkat desa dan kelurahan, sesuai dengan edaran Bupati yang diterbitkan untuk mengakomodasi hal tersebut.

Disisi lain juga Operator dinas Hermanto Syam mengamini permasalahan yang sama dari sisi operasional, bahwa salah satu hal yang paling mengecewakan bukan dari sisi teknis sistem, melainkan dari sisi insentif operator yang dinilai belum terakomodasi secara memadai dalam APBD maupun APBN. Operator desa Ismail bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa sebelum berbicara tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui SIKS-NG, perlu lebih dulu diperhatikan kesejahteraan para operator sebagai ujung tombak sistem tersebut.

c. Infrastruktur teknologi informasi

Berdasarkan hasil lapangan ditemukan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara kondisi infrastruktur di tingkat Dinas Sosial Kabupaten dengan kondisi infrastruktur yang dihadapi oleh operator di tingkat desa. Di tingkat Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara, kondisi infrastruktur teknologi informasi secara umum dinilai cukup memadai untuk mendukung operasional Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) sehari-hari. Seperti yang disampaikan oleh operator dinas Resti Eka Fitriana menyatakan bahwa spesifikasi perangkat keras dan turunannya yang dimiliki saat ini sudah 100% memadai untuk menjalankan SIKS-NG secara optimal.

Sedangkan ditingkat desa operator secara konsisten melaporkan kendala infrastruktur, khususnya jaringan internet yang tidak stabil. Hal ini merupakan salah satu hambatan terbesar dalam penggunaan SIKS-NG di desa-desa di Kabupaten Luwu Utara. Seperti yang disampaikan oleh Rahmawati seorang operator desa Tulung Indah, ia menyatakan bahwa gangguan sistem dan jaringan internet yang tidak stabil sering menjadi penyebab keterlambatan dalam penginputan dan pembaruan data.

d. Perencanaan penerapan

Temuan tulisan ini menunjukkan bahwa perencanaan dalam SIKS-NG di Kabupaten Luwu

Utara secara umum mengikuti panduan dari Kementerian Sosial, namun beberapa elemen perencanaan strategis di tingkat daerah masih perlu diperkuat. Memang benar bahwa roadmap penerapan SIKS-NG mengikuti regulasi ini diluncurkan berdasarkan Permensos yang berlaku beserta turunannya. Akan tetapi seperti yang dikatakan oleh sekretaris dinas permasalahan lain yang muncul adalah belum pernah dilakukannya analisis kesiapan organisasi atau readiness assessment secara formal sebelum penerapan SIKS-NG dijalankan.

Evaluasi Proses

Evaluasi proses bertujuan untuk memantau dan menilai bagaimana penerapan SIKS-NG berlangsung dalam praktik sehari-hari yang mencakup kualitas pelatihan dan pengembangan kapasitas, efektivitas koordinasi antar instansi, mekanisme pemantauan sistem, serta tingkat adopsi pengguna terhadap sistem. Adapun hasil temuan lapangan dari evaluasi proses sebagai berikut:

a. Pelatihan dan pengembangan kapasitas operator

Berdasarkan hasil lapangan berupa wawancara menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam hal frekuensi, kualitas, dan aksesibilitas pelatihan antara operator dinas dan operator desa. Frekuensi pelatihan berbasis zona dilakukan tidak merata, seperti yang dikatan oleh operator desa Salulemo bapak Ismail yang melaporkan bahwa sejak beralih ke DTSEN (versi pembaruan DTKS dalam SIKS-NG) belum ada pelatihan yang diselenggarakan untuk para operator desa. Situasi ini menempatkan operator dalam posisi yang sangat sulit karena harus menghadapi antarmuka sistem yang berubah tanpa mendapatkan panduan dan bimbingan yang memadai.

Sementara itu Musdalipah, operator Desa Tamboke menggambarkan bahwa pelatihan sangat jarang dilakukan dan ketika dilaksanakan, waktu yang tersedia sangat terbatas sehingga tidak efektif untuk mentransfer seluruh pengetahuan yang diperlukan. Sedangkan Rahmawati operator Desa Tulung Indah memberikan perspektif yang sedikit berbeda. Ia menyatakan bahwa pelatihan telah dilaksanakan sebanyak 3 hingga 5 kali dan dihadiri oleh para operator dari tingkat desa dan kabupaten. Pelatihan dinilai cukup efektif, namun mengingat seringnya terjadi perubahan menu pada tampilan SIKS-NG sehingga para operator desa masih sering kebingungan ketika berhadapan dengan fitur-fitur

baru yang muncul setelah pembaruan sistem.

b. Koordinasi antar instansi dan sinkronisasi data

Berdasarkan data hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi pada dasarnya berjalan, namun masih menghadapi beberapa kendala teknis yang perlu diselesaikan. Kepala Bidang Maliana menjelaskan bahwa sinkronisasi data antara SIKS-NG dengan data Dukcapil dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri, bukan oleh pemerintah daerah secara mandiri. Namun dalam praktiknya, sering terjadi error pada aplikasi pada saat proses pemadanan data. Ketika ditemukan data yang terdeteksi tidak valid pada saat diinput di SIKS-NG, biasanya masalah ini dapat diselesaikan setelah dilakukan konsolidasi data di Dukcapil.

Permasalahan yang ada perihal padanan data untuk warga yang berpindah domisili. Operator Desa Salulemo Ismail menjelaskan bahwa saat ini proses pemadanan data bagi warga yang pindah domisili masih harus dilakukan di daerah asal, bukan di daerah tujuan. Hal ini menjadi kendala bagi operator desa tujuan yang ingin mendaftarkan warga baru dalam sistem, karena harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan operator di daerah asal yang mungkin memiliki keterbatasan aksesibilitas komunikasi.

c. Pemantauan dan pengendalian sistem

Berdasarkan hasil wawancara seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang mengakui bahwa proses pemantauan penggunaan sistem dan kualitas data oleh manajemen sampai saat ini kurang rutin dilakukan. Meskipun tanggung jawab pemantauan ada pada Dinas Sosial sebagai koordinator implementasi di tingkat kabupaten, intensitas dan konsistensi pemantauan belum mencapai tingkat yang ideal. Kondisi ini berpotensi menyebabkan tidak terdeteksinya masalah-masalah kecil dalam kualitas data sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

d. Tingkat adopsi sistem oleh pengguna

Secara umum temuan penelitian sesuai data wawancara menunjukkan bahwa para operator, baik di tingkat dinas maupun desa telah mengadopsi SIKS-NG sebagai alat kerja utama dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial. Seluruh informan setuju bahwa SIKS-NG telah memudahkan pekerjaan mereka dibandingkan dengan proses manual sebelumnya. Seperti yang disampaikan oleh

operator dinas Resti Eka Fitriana bahwa SIKS-NG sangat memudahkan pekerjaan karena dapat dikerjakan di mana saja dan kapan saja. Hermanto Syam juga menyatakan bahwa sistem sangat memudahkan terutama dalam proses pengusulan dan informasi bantuan sosial. Operator desa Rahmawati juga mengkonfirmasi bahwa sistem daring telah memudahkan proses penginputan data dan proses pengusulan bantuan sosial.

Evaluasi produk

Temuan berdasarkan hasil wawancara dalam evaluasi produk mencakup empat dimensi utama. Yaitu akurasi data, kecepatan proses, pengurangan *inclusion* atau *exclusion error*, dan pengambilan keputusan berbasis data.

a. Peningkatan akurasi data penerima manfaat

Berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa penerapan SIKS-NG telah berhasil meningkatkan akurasi data secara signifikan dibandingkan dengan era pendataan manual sebelumnya. Peningkatan akurasi data yang dikonfirmasi Kepala Bidang merupakan salah satu capaian terpenting dari penerapan SIKS-NG. Sistem yang berbasis 26 variabel kemiskinan yang terstandarisasi menciptakan barrier yang efektif terhadap manipulasi data.

b. Efisiensi proses verifikasi dan validasi data

Penerapan SIKS-NG telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam hal efisiensi proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial di Kabupaten Luwu Utara. Sebelum era SIKS-NG proses verifikasi dan validasi data dilakukan secara manual dan memerlukan waktu yang sangat lama, sementara sekarang proses tersebut dapat dilakukan secara rutin setiap bulan melalui platform online.

Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala Bidang yang mengatakan bahwa dengan adanya SIKS-NG verifikasi dan validasi data kini dapat dilakukan setiap bulan, ini merupakan lompatan efisiensi yang sangat besar dibandingkan dengan era sebelumnya. Hal senada juga disampaikan oleh operator dinas Tri Devi yang mengkonfirmasi bahwa verifikasi dan validasi sekarang dapat dilakukan setiap bulan, itu sangat membantu dalam menjaga kemutakhiran data. Hermanto Syam juga menambahkan bahwa

dalam penerapan SIKS-NG proses verifikasi dan validasi dilakukan setiap bulan, sementara penetapan data dilakukan per tiga bulan.

c. Pengurangan *inclusion error* dan *exclusion error*

Temuan lapangan menunjukkan bahwa penerapan SIKS-NG telah berhasil mengurangi kedua jenis error tersebut secara signifikan. Kepala Bidang menjelaskan bahwa SIKS-NG telah menyediakan fitur pentidaklayakan dan pengusulan, sehingga ketika ditemukan data *inclusion error* dapat segera dilakukan proses pentidaklayakan. Sebaliknya, ketika ditemukan data *exclusion error*, operator dapat segera mengusulkan agar yang bersangkutan masuk sebagai penerima bantuan sosial.

d. Pengambilan keputusan berbasis data

Salah satu nilai strategis yang dimiliki oleh SIKS-NG dan diapresiasi oleh para pengambil keputusan di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara adalah kemampuannya sebagai alat pengambilan keputusan berbasis data. Dashboard analitik yang tersedia dalam SIKS-NG menyediakan informasi terkini tentang kondisi penerima manfaat, progress verifikasi data, dan indikator-indikator kinerja program yang dapat diakses secara *real-time*.

Kepala Dinas menegaskan bahwa data SIKS-NG sudah dijadikan pedoman dan rujukan bagi seluruh program yang ada di pemerintah daerah. Sementara itu Kepala Bidang mengkonfirmasi bahwa SIKS-NG sebagai media pengelola DTKS merupakan sumber data penerima bantuan sosial, baik untuk internal Dinas Sosial maupun SKPD lainnya. Dashboard yang tersedia memudahkan pimpinan dalam mengakses data dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan termutakhir.

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh temuan evaluasi yang telah dipaparkan sebelumnya, bagian ini akan menyajikan hasil evaluasi secara komprehensif tentang pelaksanaan SIKS-NG di Kota Luwu Utara. Pada bagian evaluasi konteks, dimensi regulasi dan kebijakan sudah bernilai baik, hal tersebut karena regulasi yang ada sudah dipatuhi dengan baik. Dimensi dukungan manajemen juga sudah baik, Bupati dan Kepala Dinas memberikan dukungan penuh, pelaksanaan tercantum dalam visi misi penurunan kemiskinan, ada alokasi anggaran dari APBD dan dana desa walaupun jumlahnya sangat kecil.

Evaluasi input pada bagian dimensi SDM dan kompetensi bernilai cukup, hasil lapangan menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi signifikan, hanya sekitar 30% operator desa menguasai seluruh fitur, selain itu sering terjadi pergantian operator di tingkat desa. Pada dimensi anggaran bernilai kurang, hal tersebut disebabkan oleh anggaran yang ada jumlahnya terbatas. Untuk dimensi infrastruktur bernilai cukup, contohnya adalah terkait jaringan, dalam hal ini jaringan ditingkat dinas memadai, sementara ditingkat desa jaringan tidak stabil, dan website kemensos sering kali eror.

Evaluasi proses pada dimensi pelatihan dan bimbingan teknis dirasa cukup, pelatihan yang ada hanya dilakukan setahun sekali, dan beberapa operator desa yang menjadi pengganti belum mendapatkan pelatihan. Dimensi antar instansi dinilai cukup, untuk dimensi evaluasi dan monitoring bernilai kurang, pemantauan yang dilakukan oleh dinas masih kurang dilakukan. Evaluasi produk dimensi akurasi data dinilai baik, sangat jarang terjadi duplikasi data. Untuk dimensi kecepatan proses juga memiliki nilai baik, begitu juga dengan dimensi pengurangan eror yang terjadi bernilai baik.

Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa komponen konteks memperoleh penilaian terbaik dengan kondisi kerangka regulasi yang komprehensif dan dukungan manajemen yang kuat. Komponen produk juga menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama dalam hal peningkatan akurasi data, kecepatan proses verifikasi, dan pengurangan error. Sementara itu komponen input dan proses masih memerlukan perhatian dan perbaikan yang lebih serius, khususnya dalam hal kapasitas SDM operator, kecukupan anggaran, stabilitas infrastruktur di tingkat desa, dan frekuensi pelatihan yang masih belum memadai.

Referensi

- Andriani, Y., Suwitri, S., & Yuniningsih, T. (2023). Penerapan e-government melalui sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (SIKS-NG) sebagai aplikasi pengolah data kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 11(2), 129–147. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v11i2.11255>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara. (2024). Profil kemiskinan Kabupaten Luwu Utara, Maret 2024.

<https://luwuutarakab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/14/25/profil-kemiskinan-kabupaten-luwu-utara--maret-2024.html>.

BPS Sulawesi Selatan. (2022). Number of beneficiary family and food social assistance budget by regency/municipality in Sulawesi Selatan Province. <https://sulsel.bps.go.id/en/statistics-table/3/TWt0MVNGZFdiV2RaYTFoS1oyRnRSVTFOYUhSc1VUMDkjMw==/number-of-beneficiary-family-and-food-social-assistance-budget-by-regency-municipality-in-sulawesi-selatan-province--2022.html?year=2022>.

BPS Sulawesi Selatan. (2021). <https://sulsel.bps.go.id/en/statistics-table/3/TWt0MVNGZFdiV2RaYTFoS1oyRnRSVTFOYUhSc1VUMDkjMw==/jumlah-keluarga-penerima-manfaat--dan-anggaran-bantuan-sosial-pangan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-selatan--2021.html?year=2021>.

Creswell, J. W. (n.d.). *Choosing qualitative inquiry & research design choosing among five approaches*. SAGE Publications.

Faizin, I. (2021). Evaluasi program tahfidzul Qur'an dengan model CIPP. *Jurnal Al-Miskawaih*, 2(2), 99–118. DOI: <https://doi.org/10.58410/al-miskawaih.v2i2.362>.

Gobel, U,T. Katill, M,R. Pollin, M. (2022). Evaluasi tingkat kepuasan pengguna SIKS-NG menggunakan metode EUCS di Kabupaten Bone Bolango. *DIFFUSION Journal Of System And Information Technology*. Volume 2, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.37031/diffusion.v2i2.13418>.

Haromin, & Andriyansah, D. (2022). Efektivitas Penerapan e-government melalui sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (SIKS-NG) sebagai aplikasi pengolah data kemiskinan di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*. Volume 6 Nomor 3. (34-56) (P-ISSN 2087-474X). <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/958>

Janssen, M., & van der Voort, H. (2020). Agile and adaptive governance in crisis response: Lessons from the COVID-19 pandemic. *International Journal of Information Management*, 55(June), 102180. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102180>.

Mahmudi, I. (2011). CIPP: suatu model evaluasi program pendidikan. *At-Ta'dib*, 6(1). <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v6i1.551>.

Malipi, S., Akbar, M. F., & Sakbir. (2023). Implementasi program data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) melalui sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (SIKS-NG) di Desa Huntu Kecamatan

- Batudaa Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Gorontalo*, 1-15.
<https://repository.umgo.ac.id/824/>.
- Moleong, Lexy J. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif. edisi revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nasution, A, F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: CV Harfa Creative.
- Novita, W. (2022). *Data sektoral tahun 2022*. [https://e-ppid.luwuutarakab.go.id/uploads/informasi_publik/1699856968DATA_SEKTORAL_\(1\).pdf](https://e-ppid.luwuutarakab.go.id/uploads/informasi_publik/1699856968DATA_SEKTORAL_(1).pdf)
- Padang, A. B., H, H., Nur, M. I. I., & Rahayu. (2026). Evaluasi kinerja tim pengelola aplikasi SIKS-NG pada Dinas Sosial Kabupaten Yalimo. *Jurnal Progress Administrasi Publik*, 6(1), 44–54.
<https://doi.org/10.37090/7vsnnn82>.
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.
- Pohan, H. F., & Salisah, F. N. (2021). Usability analysis of social welfare information system next generation using McCall Method in Langkat District Social Service. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*. Volume 6, Issue 8. ISSN No:-2456-2165. <https://repository.uin-suska.ac.id/55583/1/Paper%20-%20Hendra%20Fareza%20Pohan.pdf>.
- Purwati, E,H. (2023). Penerapan e-Government pada aplikasi SIKS-NG di Desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba. *PARAPOLITIKA Journal of Politics and Democracy Studies (JPDS)*. Volume 4 Nomor 1. DOI: <https://doi.org/10.33822/jpds.v4i1.6580>.
- Rahmayanti, J. D., Isfa, N., Chusnah, N., & Suparto. (2024). *CIPP evaluation model in learning in madrasah*. 15(1), 33–42. DOI <https://doi.org/10.31942/mgs.v15i1.10917>.
- Ramadan, Ergi et all (2004). Penerapan e-government melalui sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (SIKS-NG) untuk pengajuan DTKS. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*. Volume 4 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i2.1140>.
- Salsabila, A, K. Affifudin. Rahmawati, S, D. (2025). Efektivitas sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (SIKS-NG) sebagai pengolah data kemiskinan Desa Grobogan Kecamatan Mojokwarno Kabupaten Jombang. *Jurnal Respon Publik*. ISSN: 2302-8432. Vol. 19 , No. 7. ISSN:2302-8432.
<https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/28996>.
- Sekar Arum Puspita Ramadhani, & Agustina, I. F. (2025). Efektivitas sistem informasi kesejahteraan sosial

- next generation (SIKS-NG) sebagai aplikasi pengolah data kemiskinan desa. *Dinamika governance jurnal ilmu administrasi negara*. Vol. 14 No. 04. 399-409. DOI : <https://doi.org/10.33005/jdg.v14i4.4913>.
- Setiawan, A., & Yamasari, Y. (2025). Evaluasi performa website sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS-NG) di Kelurahan Lembeyan Kulon Kabupaten Magetan dengan google light house. *Journal of Informatics and Computer Science (JINACS)*, 7(01), 218–227. DOI: <https://doi.org/10.26740/jinacs.v7n01.p218-227>.
- Sarwono, J. (2006). Metode penelitian kuantitatif & kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sulistiyawati. (2023). Buku ajar metode penelitian kualitatif. Yogyakarta: K-Media.
- Stufflebeam, D. L. (2000). The CIPP model for evaluation. in *evaluation models: Viewpoints on educational and human services evaluation* (pp. 279–317). Springer. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/0-306-47559-6_16.
- Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). *The CIPP Evaluation model how to evaluate for improvement and accountability*. THE GUILFORD PRESS.
- Yulfa, S., & Suhita, D. (2025). Efektivitas program sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (SISK-NG) berbasis e-government di Dinas Sosial Kabupaten Sragen. *SOLIDARITAS Ilmu Sosial*, Volume 9 nomor 1. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/12230>.
- Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Zidan, Mhd. Syamsir. (2026). Efektivitas penerapan aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial - next generation (Siks-Ng) dalam pengusulan bantuan sosial di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang. *Jurnal Teori dan Praktek Administrasi Publik*. Volume 10 nomor 1. DOI: <https://doi.org/10.24036/jtrap.v10i1.199>.